

Article History
Submitted: 25-11-2019
Revised: 16-01-2020
Accepted: 01-02-2020

Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan

ISSN: 2580-863X (p); 2597-7768 (e);

Vol. 3, no. 2 (2019), hal. 353-376, doi: 10.14421/jpm.2019.032-06

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jpmi/index>

Peningkatan Kemandirian Desa Panggungharjo Melalui Komunikasi Pembangunan

Nanang Mizwar Hasyim
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: mizwar.hasyim@uin-suka.ac.id

Abstract

This article explores the village independent of Panggungharjo through developed communication. Based on the qualitative-descriptive method, it can be a result of a new perspective on independent village development. The development of communication by the stronger local leadership can be Panggungharjo Village entrance of the nomination of the better village in Indonesia for Village-Owned Enterprises (*Badan Usaha Milik Desa*) on developing of institutional governance. Leadership as a local strongman has established to analyze framing on the role of communication with the people. The participation can be conducted to developing programs on physically and unphysically. This paper founded on social services programs (education, health, and economic) and better central both effective and efficiency on Village-Owned Enterprises management. This enterprise can be economic productivity increasingly. In adding of village budgeting from the result of economic productivity on access and planning social programs more accessible for societies.

Keywords: the development of communication; social participation; village independent.

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi kemandirian Desa Panggungharjo melalui komunikasi pembangunan. Hal ini dilandasi oleh prestasi Desa Panggungharjo yang berhasil menjadi desa mandiri. Melalui metode kualitatif-deskriptif dapat menghasilkan satu perspektif baru dalam pembangunan desa mandiri. Ternyata, komunikasi pembangunan yang diciptakan oleh kekuatan *leadership* lokal mampu menjadikan Panggungharjo masuk nominasi desa terbaik di Indonesia dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). *Leadership* sebagai *local strongman* telah membingkai *framing* analisis dalam pola komunikasi dengan masyarakat. Dengan komunikasi efektif menghasilkan masyarakat yang pasif menjadi lebih aktif. Hal ini terlihat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan. Partisipasi tersebut telah mampu menjalankan program-program pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Temuan penelitian yang paling menonjol adalah program pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) tersentral dengan baik melalui pengelolaan BUMDesa secara efektif dan efisien. BUMDesa menjadi motor penggerak pelayanan karena pendapatan secara ekonomis setiap tahun terus meningkat. Kondisi ini menjadikan pendapatan desa semakin bertambah. Dengan



Creative Commons Non Commercial CC-BY-NC: This work is licensed under a [Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-commercial use, reproduction, and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed as specified on the *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* and Open Access pages.

penambahan anggaran desa dari hasil produktifitas ekonomi semakin mempermudah akses dan perencanaan program pelayanan sosial bagi masyarakat.

Kata Kunci: komunikasi pembangunan; partisipasi masyarakat; kemandirian desa.

Pendahuluan

Kemandirian desa merupakan sebuah harapan bangsa Indonesia. Desa yang mandiri disinyalir secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk itu, kemandirian desa perlu didukung oleh kegiatan yang bersifat kreatif, komitmen tinggi, dan konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan, yang direncanakan secara strategis dan terukur.¹

Dalam studi empiris Sidik, kemandirian desa dapat dilakukan jika modal sosial di masyarakat bersifat partisipatif. Unsur partisipatif ini dapat berkembang baik apabila terdapat organisasi sosial, kepercayaan, norma, dan jaringan yang mendukung kegiatan pembangunan desa.² Sementara itu, studi Gayatri (et.al) juga membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat mendorong peningkatan kemandirian desa. Semakin baik transparansi dan akuntabilitas maka dapat berdampak langsung kepada tata kelola pemerintahan yang efektif. Hal ini secara nyata memberi signifikansi positif bagi kemandirian desa.³

Kemandirian desa juga menjadi modal masyarakat untuk hidup tetap lestari. Desa lestari merupakan bagian dari desa mandiri. Kondisi ini dapat ditinjau dengan seberapa besar tingkat pendapatan masyarakat dalam income secara ekonomi per kapita.⁴ Konsep ini sejalan dengan teori yang diungkapkan

¹ Asa Ria Pranoto dan Dede Yusuf, "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarij Aya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22146/jsp.13094>.

² Fajar Sidik, "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa," *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19, no. 2 (2015): 115–31, <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>.

³ Gayatri, Made Yeni Latrini, dan Ni Luh Sari Widhiyani, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10, no. 2 (2017): 175–82, <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p07>.

⁴ Muhammad Israr et al., "Livelihood Diversification: A Strategy for Rural Income

oleh Chambers & Conways (1992) yang menyebutkan tentang penghidupan lebih baik terdiri dari kemampuan, aset, dan kegiatan-kegiatan produktif. Secara spesifik, kerangka konseptual kemandirian desa yang berkelanjutan harus memperhatikan tiga unsur, yakni aset (manusia, psikologis, alam, dan sosial), akses (institusional, pemerintah, sumber ekonomi-politik), dan *outcome* (kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pendapatan keluarga, dan pengentasan kemiskinan).⁵

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa kemandirian desa menjadi agenda penting untuk mewujudkan kehidupan desa yang berkelanjutan (*sustainability livelihood*). Pro dan kontra tentang pandangan kemandirian desa juga menjadi masalah yang hendak dipecahkan dalam artikel ini. Namun tidak terjebak pada masalah perspektif penggunaan kajian teoritis. Untuk itu, artikel ini mencoba menawarkan konsep baru dalam membangun desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat berbasis komunikasi pembangunan.

Proses komunikasi pembangunan, dalam aplikasinya sudah banyak yang menerapkan. Namun secara spesifik peneliti mencoba untuk menelisik kembali program pembangunan di Desa Panggungharjo yang masuk nominasi pengelola BUMDesa terbaik nasional. Dengan mengacu kepada literatur ide di atas, sejak tahun 2012 Desa Panggungharjo sudah merencanakan program pembangunan dengan dilandasi oleh pemberdayaan potensi lokal. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan persoalan yang dihadapinya. Program tersebut melalui pemberdayaan dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), kelembagaan, efektifitas pemerintahan, keamanan dan ketertiban, serta peningkatan partisipasi masyarakat.⁶

Dari program yang terencana, fokus pada delapan pemberdayaan yang menimbulkan banyak inovasi strategis yang memiliki nilai positif bagi

Enhancement.” *Journal of Finance and Economics* 2, no. 5 (2014): 194–98, <https://doi.org/10.12691/jfe-2-5-10>.

⁵ R. Chambers dan R. Conway, “Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century,” *IDS Discussion Paper*, vol. 296, 1992.

⁶ “Profil dan Program Kerja Desa Panggungharjo,” Pemerintah Desa Panggungharjo, 2013, <http://panggungharjo-bantul.desa.id>.

masyarakat. Kondisi ini bisa dilihat dari fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan program BUMDesa Panggung Lestari. Implementasi program tersebut berupa Rumah Pengelolaan Sampah (RPS). Program RPS memiliki empat cakupan penting yang sudah berjalan sejak 2013, yaitu Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS). Selain itu, juga terdapat pelayanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dalam bentuk program Bapel JPS.

Inovasi program yang berjalan merupakan terobosan mutakhir. Program utama melalui pengembangan sektor usaha rumah tangga yang dikelola oleh pemerintah desa dilakukan dengan memperhatikan potensi lokal (*asset based community development*).⁷ Selain itu, program tersebut juga menjadi pendorong ekonomi warga dan hasil nilai lebih diterapkan pada program lain melalui mekanisme subsidi silang.⁸ Hasil program subsidi silang ini bernama Bapel JPS. Program Bapel JPS fokus pada pelayanan kesehatan gratis bagi kelompok rentan. Adapun pelayanan yang diberikan berupa kartu sehat, pendidikan dalam bentuk kartu pintar, dan pelayanan kesehatan Ibu-Anak dalam bentuk kartu KIA.

Program kemandirian Desa Panggungharjo merupakan bukti nyata dalam upaya pembangunan. Proses pelibatan masyarakat desa melalui partisipasi sebagai wujud efektif dari komunikasi pembangunan. Setiap langkah pembangunan merupakan ikhtiar untuk mewujudkan desa mandiri melalui kerja keras, kreatif, dan inovatif. Hal ini dapat terwujud jika rencana pembangunan disusun secara strategis. Proses analisis dan evaluatif juga menjadi modal penting mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Pembangunan desa dapat berhasil efektif jika komunikasi menjadi titik sentral yang dipegang oleh kepala desa sebagai pemimpin lokal. Komunikasi pembangunan adalah desain program yang direncanakan secara sistematis

⁷ Christian Blickem et al., "What Is Asset-Based Community Development and How Might It Improve the Health of People With Long-Term Conditions? A Realist Synthesis," *SAGE Open* 8, no. 3 (2018): 1–13, <https://doi.org/10.1177/2158244018787223>.

⁸ Muhammad Anas, Wahyu Widodo, dan FX Sugiyanto, "Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia," *Economics Development Analysis Journal* 5, no. 4 (2016): 426–43.

dari aktivitas partisipatif, pendekatan komunikasi, metode perencanaan, dan media untuk berbagi informasi di antara para stakeholders desa. Hal ini menjadi tindakan yang paling wahid untuk membangun kepercayaan (*trust*) dan kesepakatan bersama. Apabila kepercayaan dan kesepakatan sudah terjadi maka tindakan program dapat berjalan secara efektif dan berdaya guna.⁹

Dari berbagai cakupan analisis di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pamong Desa Panggungharjo untuk mewujudkan kemandirian desa. Hal ini dilandasi oleh prestasi Desa Panggungharjo yang berhasil menjadi desa mandiri. Untuk itu, penelitian ini bisa menghadirkan pemahaman baru tentang upaya membangun desa mandiri dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan bisa memperoleh referensi baru atas inovasi pembangunan bagi desa-desa lain di Indonesia.

Kemandirian Desa dan Kekuatan *Leadership* Lokal

Desa mandiri adalah desa yang mampu menciptakan kemandirian. Masyarakat desa mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri tanpa bergantung kepada pemerintah atau pihak lain.¹⁰ Walaupun ada bantuan dari pemerintah, konteks ini sifatnya hanya simultan atau perangsang untuk dapat hidup mandiri. Sementara itu, *World Wide Fund for Nature* dan *Kayan Mentarang*, memahami desa mandiri adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada.¹¹

Menurut Mitra Samya, mitra strategis ACCESS memahami kemandirian desa sebagai arah perkembangan yang membangun sesuai

⁹ Chike Anyaegbunam, Paolo Mefalopulos, dan Moetsabi Titus, *Participatory Rural Communication Appraisal Starting with The People* (Zimbabwe: SADC Centre of Communication for Development, 2004), hal. 14.

¹⁰ Sutoro Eko, Krisdyatmiko, dan Abdur Rozaki, *Kaya Proyek, Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa* (Yogyakarta: IRE & Yayasan Tifa, 2006); Wan Abbas Zakaria, *Membangun Kemandirian Desa* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017).

¹¹ Sutedja, Lene Topp, dan Cristina Eghenter, *Kayan Mentarang National Park in the Heart of Borneo* (Copenhagen: WWF Denmark in collaboration with WWF Indonesia, 2005).

dengan potensi dan kekuatan lokal. Kemandirian desa tidak berarti berdiri sendiri dalam ruang politik yang hampa.¹² Namun juga tidak bergantung pada instruksi dan bantuan pemerintah. Dengan demikian, kemandirian desa adalah masalah kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal, kebersamaan, kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial.¹³

Berdasarkan definisi itu, Mitra Samya menunjukkan bahwa kemandirian desa memiliki beberapa ciri, antara lain: (1) kemampuan desa yang mampu mengurus dan mengatur kehidupan sesuai dengan kekuatan-potensi yang dimiliki; (2) pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran—satu desa, satu perencanaan; sebagai acuan seluruh program pembangunan yang dijalankan secara konsisten; (3) sistem pemerintahan desa yang menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok marginal; (4) sumberdaya pembangunan dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakat desa.¹⁴

Dengan begitu, kemandirian desa harus dikelola melalui cakupan dari komponen demokrasi. Ada relasi antara desa dengan masyarakatnya. Demokrasi menjadi prasyarat yang harus ada dalam fondasi membangun kemandirian desa.¹⁵ Secara demokratis, Desa Panggunharjo telah menjadi *role model* dalam membangun desa mandiri. Arah pembangunan yang menjadi pokok kajian mewujudkan kemandirian desa harus mengacu kepada

¹² Berna Sudjana Ermaya, "Kemandirian Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan," *Litigasi* 16, no. 2 (January 7, 2016), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36>; Diyah Indirasari, *Kemandirian Desa di Era Otonomi Daerah, Studi Kasus di Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004).

¹³ Hemptri Suyatno and Suparjan, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000).

¹⁴ Widuri, Diah, dan Saubaki Patje, *Partisipasi Warga dalam Penanggulangan Kemiskinan: Pelajaran Berharga Dari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Stock Take: Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan* (Yogyakarta: IRE, 2012).

¹⁵ Fikri Habibi, *Pasang Surut Otonomi Desa* (Serang: Universitas Serang Raya, 2017).

kebutuhan riil masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah hadir program Desa Mandiri Energi. Program ini merupakan kajian yang mengarusutamakan pemanfaatan potensi lokal sebagai aset pembangunan. Salah satu bukti nyata dari program ini mendorong kegiatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pangan.

Di sisi lain, indikator Desa Panggungharjo menjadi desa mandiri mengacu kepada Catur Sakti UU Desa yang disederhanakan dalam Tri Sakti Nawa Cita. Adapun kriteria-kriteria tersebut, antara lain: *pertama*, kekuatan sosial yang kondusif. Kondisi ini dipahami sebagai kekuatan pembangunan dengan membangun ikatan masyarakat melalui solidaritas sosial. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Pada saat kapasitas negara tidak sanggup menjangkau hingga level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen untuk menjalankan berbagai proyek pembangunan prasarana desa yang tercukupi dengan baik.¹⁶

Kedua, berdaulat secara politik. Berdaulat secara politik mengandung pengertian bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus dirinya meski pada saat yang sama negara tidak hadir. Meski negara hadir, terkadang kehadirannya berlebihan sehingga berpotensi memaksakan (*imposition*) kehendak prakarsa kebijakan pusat yang justru akan melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu, kemandirian politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara. Dalam konteks ini negara perlu mengambil langkah fasilitatif terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga. Tentu saja, konteksnya untuk menggantikan imposisi sekaligus menumbuhkan emansipasi yang lebih luas.¹⁷

¹⁶ Borni, Kurniawan dan M. Zainal. Anwar, *Menjembatani Rakyat dan Negara: Pengalaman Advokasi IRE Yogyakarta* (Yogyakarta: IRE & Asia Foundation, 2011), hal. 14.

¹⁷ Kurniawan dan Anwar, hal. 16.

Ketiga, berdaulat secara ekonomi. Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola, dan mengoptimalkan fungsi aset-aset alam yang ada di desa. Hal ini sebagai respon atas kegamangan negara yang terjebak dalam model pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata.¹⁸ Untuk itu, desa memelopori pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, keseimbangan alam dapat lestari yang berimplikasi kepada orientasi kesejahteraan secara berkelanjutan. Secara garis besar, peran besar dalam perencanaan pembangunan desa dimotori oleh Kepala Desa Panggungharjo, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Sejak terpilih menjadi Kepala Desa, dengan mekanisme pemilihan yang demokratis (tanpa *money politic*) tahun 2012, perlahan-lahan memberikan progres perubahan pembangunan desa yang signifikan. Perubahan tersebut bisa dilihat bagaimana kesadaran masyarakat terbangun dengan keterlibatan warga dalam perumusan kebijakan. Langkah *urgent* yang sudah dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga desa yang melibatkan semua warga secara partisipatif.

Sebelum Wahyudi terpilih sebagai kepala desa, masyarakat Panggungharjo cenderung pasif dalam program-program yang diselenggarakan. Kondisi ini terkesan minimnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan bersama yang dihadapi dan sulit memahami visi-misi pemerintah desa. Selain itu, juga hambatan yang dihadapi kesalahan persepsi baik oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah tentang tugas dan tanggung jawab aparatur desa sebagai pemerintahan kecil di tingkat pedesaan. Pasca terpilih, Wahyudi bergegas membangun komitmen bersama melalui mekanisme komunikasi pembangunan.

Landasan analisis yang dipetakan kepala desa terpilih menyebabkan berbagai permasalahan dalam mewujudkan kemandirian Desa panggungharjo. Kepala desa harus bekerja lebih ekstra untuk menentukan indikator keberhasilan pembangunan desa mandiri. Kecerdikan kepala desa pada

¹⁸ Israr et al., "Livelihood Diversification: A Streatagy for Rural Income Enhancement."

gilirannya mampu memetakan potensi lokal berbasis aset. Aset ini menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan desa secara struktur sistematis. Salah satu aset yang dikembangkan adalah kapasitas sosial berupa sumber daya yang dimiliki masyarakat, kapasitas politik, kekuatan kepemimpinan, dan manajemen birokrasi yang ditata lebih profesional. Beberapa indikator tersebut menjadi kunci kemandirian desa Panggungharjo. Namun dari semua indikator yang ada, faktanya kapasitas sosial sebagai indikator yang paling menonjol. Hal ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari modal sosial yang menghendaki adanya kepercayaan maksimal dari masyarakat. Kepercayaan yang muncul menjadi modal sosial utama dalam membangun desa mandiri.

Desa mandiri secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun sebelum Wahyudi terpilih menjadi Kepala Desa Panggungharjo, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat minim. Fenomena ini menjadi kendala dalam pembangunan desa karena tidak ada yang mendorong kekuatan sumber daya manusia untuk maju secara bersama. Dengan masyarakat yang heterogen seyogyanya menjadi tantangan berat untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Jika ditelisik lebih jauh, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa muncul dari persepsi masyarakat yang tidak memberikan ruang kebebasan dan kedaulatan bagi desa. Dua katup ini sejatinya jika berjalan dapat mengatur dan mengelola potensi lokal desa yang lebih baik. Alasan ini menjadi rahasia umum yang dipahami masyarakat sehingga tantangan besar kepala desa baru untuk membangun *trust* khususnya sektor administrasi publik. Kondisi ini menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat yang kurang paham visi- misi pemerintah desa. Untuk merubah ketidakpercayaan ini, kepala desa baru merubah *mindset* masyarakat agar memahami daya tawar desa yang lebih baik dari sebelum adanya UU Desa. Selain kepercayaan, syarat berikutnya yang dilakukan adalah mendorong kapasitas sosial untuk menjadi modal sosial yang kapabel. Dalam varian ini, dibagi menjadi tiga aspek, yaitu kapabilitas sosial, kapabilitas ekonomi dan

kapabilitas politik.¹⁹ Dari ketiga aspek ini, aspek yang menjadi kunci untuk menunjang efektifitas program desa terletak pada aspek sosial.

Masalah yang kerap muncul dalam menciptakan kapabilitas sosial adalah ruang-ruang sosial yang mulai pudar. Ruang sosial ini berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan permasalahan desa guna mencari alternatif penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena mulai tumbuhnya sifat pragmatis dan hedonis masyarakat sehingga menimbulkan distorsi dalam pertemuan warga—pertemuan dasawisma, pertemuan pemuda, pertemuan keagamaan, dan pertemuan lain yang menjadi ruang sosial warga. Kondisi ini seharusnya digunakan untuk membicarakan permasalahan warga yang lebih produktif. Namun keadaan sosial berkata lain yang sudah berubah menjadi forum arisan dan simpan pinjam. Tak salah jika dalam pertemuan hanya membicarakan masalah yang bersifat pragmatis, tidak menyoal permasalahan substantif. Jauh panggang dari api untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi warga.

Kondisi tersebut sebagai dampak langsung globalisasi yang membuat masyarakat bersikap pragmatis dan hedonis. Melihat keadaan yang tidak menentu, maka Kepala Desa Panggungharjo mencari solusi atas permasalahan sosial secara partisipatif. Individualisme menyebabkan semakin pudar kepedulian sosial. Untuk itu, Kepala Desa Panggungharjo mencari terobosan baru dengan menciptakan ruang sosial baru. “*Ruang ini menjadi agenda prioritas Saya melalui kebutuhan masyarakat dengan rasa kekeluargaan yang diterapkan untuk menarik simpati dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui panggung hiburan rakyat*” tutur Wahyudi.²⁰

Pembangunan Partisipatif Melalui Komunikasi Efektif

Dalam perspektif ini, partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, emosi maupun tindakan. Capaian

¹⁹ Borni Kurniawan, Titi Kusriani, dan Arief Kurniawan, *Rural Economics* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017).

²⁰ Wahyudi Anggoro Hadi, *Wawancara*, 17 September 2018.

akhirnya mendorong masyarakat untuk memberikan sumbangan ide dan gagasan untuk mencapai tujuan yang ditentukan secara bertanggungjawab.²¹ Sedangkan pembangunan masyarakat adalah suatu gagasan perubahan dari bawah (*bottom-up*). Gagasan ini menghargai pengetahuan, keterampilan, kebudayaan sumber daya, dan proses-proses lokal sebagai sesuatu yang penting. Pendekatan dari bawah dan partisipasi merupakan prinsip fundamental dalam pembangunan masyarakat. Formulasi keduanya menempatkan komunikasi pada posisi sentral untuk menggerakkan proses-proses yang berlangsung. Adapun Peran komunikasi dan partisipasi dalam pembangunan, diantaranya: (a) Pemberdayaan masyarakat (b) Pemahaman bersama dan kesepakatan untuk berbuat (c) Melatih kelompok *interest* di masyarakat (d) Menciptakan kebijakan yang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat.²²

Alhasil, program pun dapat berjalan. Program utama yang dijalankan adalah pembangunan fisik. Program ini merupakan upaya pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas umum berupa infrastruktur yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan berdasarkan kebutuhan warga. Luas wilayah Desa Panggungharjo dengan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda menyebabkan karakter pemenuhan kebutuhan infrastruktur perlu dibangun secara beragam. Ada daerah dengan pembangunan perbaikan jalan, ketersediaan gedung untuk program PAUD, dan pembangun tempat pengelolaan sampah.

Semua program yang bersifat fisik, perencanaan pembangunan melibatkan warga masing-masing kawasan yang ada di Desa Panggungharjo. Keadaan ini difasilitasi oleh koordinator masing-masing wilayah. Selain itu, penentuan obyek pembangunan juga merujuk pada kebijakan pusat melalui

²¹ Mirza Maulana Al-Kautsari, "Model Transisi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa: Strategi Pengembangan Usaha Industri Kreatif Kerajinan Batik di Desa Kretet, Kabupaten Bantul," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-02>.

²² Erwinton Simatupang dan Vandy Yoga Swara, "Creating Shared Value di Industri Migas Pelajaran Dari Balongan dalam Meminimalisir Pengangguran dan Menekan Potensi Kecelakaan Kerja" 2, no. 1 (2018): 63-86, <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-04>.

undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Namun terkadang masalah pembangunan di lapangan dapat memicu masalah baru. “Masalah tersebut berupa perubahan rencana awal yang kurang sinkron dengan perencanaan masyarakat demi menjalankan aturan pusat” tutur Hosni.²³

Implementasi program yang akan dijalankan melalui komunikasi formal dengan warga. Metode ini dilakukan dengan komunikasi kelompok warga desa. Pada awal perencanaan program dilakukan musyawarah tahunan desa dengan metode komunikasi publik. Sementara itu, komunikasi formal juga dilakukan dengan memaksimalkan hirarki struktur keorganisasian desa. Tujuannya untuk memaksimalkan keterlibatan warga dalam pelaksanaan program. Mulai dari peran Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk membantu Kepala Dukuh dan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa). “Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan musyawarah dengan warga untuk merencanakan program pembangunan fisik desa” tutur Sumiyati.²⁴

Di sisi lain, komunikasi *non* formal juga dilakukan sebagai proses tatap muka dan satu arah kepada penerima manfaat program. Komunikasi tatap muka dilakukan oleh kepala desa dengan kepala dukuh, ketua RT, dan warga secara pribadi melalui kunjungan. Tidak hanya Kepala Desa, terkadang ketua RT dan kepala dukuh juga melakukan hal yang sama dengan melakukan komunikasi yang intens dengan warganya. Selanjutnya, komunikasi satu arah dilakukan melalui media sosial berupa *Whatsapp Group* (WAG) yang ada. Walaupun sifatnya terkesan informatif dan konfirmatif. Selain itu juga komunikasi satu arah dilakukan melalui media informasi desa yaitu web Desa. “Biasanya pesan yang disampaikan bersifat informatif dengan menggunakan narasi pemberitaan dalam setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan” tutur Setyo Rahajo.²⁵

Sejak terpilihnya Bapak Wahyudi Anggoro Hadi menjadi kepala desa pada tahun 2012—calon kepala desa yang tidak menggunakan *money*

²³ Hosni Bimo Wicaksono, *Wawancara*, 19 Oktober 2018.

²⁴ Sumiyati, *Wawancara*, 15 Oktober 2018.

²⁵ Setyo Raharjo, *Wawancara*, 19 Oktober 2018.

politic—menjadi momen kebangkitan bagi Desa Panggungharjo untuk mulai membangun secara radikal. Wahyudi melakukan terobosan berupa program yang berorientasi kepada pembangunan sumber daya manusia. Program ini menjadi embrio dari proses pemberdayaan masyarakat. Proses ini berfungsi untuk menciptakan kepercayaan masyarakat melalui program pengembangan sampah yang diberi nama Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS).

Pada tahun 2014, Undang-undang Desa hadir sebagai rekognisi untuk menjelaskan keberadaan desa. UU ini berperan sebagai usaha pembangunan bangsa yang bersifat *bottom-up*. Secara substansial, UU Desa telah memberikan kedaulatan dan kewenangan dalam mengelola aset desa untuk mewujudkan kemandirian. Setelah program KUPAS dikatakan berhasil, program lanjutan memunculkan inovasi lain yang memberi dampak kepada pelayanan sosial. Inovasi pengembangan program ini berawal dari aspirasi masyarakat. Dengan tanggap, Kepala Desa Panggungharjo mampu meningkatkan kapasitas sosial. Dari awal ini terbentuk lembaga-lembaga desa lain. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk menjalankan aspirasi-aspirasi masyarakat. Berikut adalah program yang sudah berjalan di Desa Panggungharjo yang bersifat non fisik.

Program KUPAS

Kupas didirikan tahun 2013. Berawal dari sebuah keperihatinan atas kondisi lingkungan yang setiap detik volume sampah semakin meningkat. Kondisi ini memerlukan penanganan yang serius dari semua *stakeholders* masyarakat Desa Panggungharjo. Program ini berangkat dari pemberdayaan masyarakat tingkat pedukuhan. Keberhasilan salah satu dukuh mendapat apresiasi dari Pemerintah Desa Panggungharjo. Pada gilirannya dikonsep dengan matang melalui program “Peduli Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu Kita”. Secara resmi, program pemberdayaan sampah ini diresmikan dengan nama KUPAS di tingkat desa pada tanggal 25 Maret 2013. Pada tahap berikutnya diterapkan di 14 pedukuhan Desa Panggungharjo. Penetapan Unit KUPAS menjadi program utama desa Panggungharjo. Penetapan ini

diberi legitimasi dengan pembuatan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan amanat Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam praktek di lapangan, program pengelolaan sampah kurang mendapat simpati dari masyarakat secara luas. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mensosialisasikan program peduli sampah. Alasan utama tidak mendapat simpatik warga karena kebiasaan membuang sampah sembarangan. Program ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menjadi program unggulan dan produktif.²⁶

Program pemberdayaan sampah bernama Kupas ini merupakan penegasan atas komitmen Pemerintah Desa Panggungharjo kepada masyarakat. Dengan potensi yang besar ini, program pengelolaan sampah yang sudah menjadi masalah klasik, dikemas dengan manajemen pengelolaan yang baik. Operasionalisasi Kupas dilandaskan pada asas kekeluargaan dan bekerja atas dasar prinsip demokratis; dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, sasaran program ini adalah seluruh warga Panggungharjo. Lebih khusus bagi kalangan tua dan muda untuk turut serta meningkatkan partisipasi mereka.

Peran aktif kepala desa dalam melakukan pendekatan personal terhadap masyarakat menjadi unsur penting keberhasilan program tersebut. Masyarakat perlu didekati dan dibina untuk menyadari pentingnya mengelola sampah. Sosialisasi adalah langkah jitu kepala desa untuk menyadarkan masyarakat. Materi sosialisasi yang menjadi isu utama pemerintah desa tentang pentingnya menghargai lingkungan. Doktrin “kebersihan adalah sebagian dari iman” alat ampuh untuk menyadarkan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk menyadari pentingnya mengelola sampah karena bernilai ekonomis tinggi. Dari proses ini menghasilkan efektifitas sosialisasi yang dapat diterima oleh warga Desa Panggungharjo. Namun ada warga yang berpikir untung dan rugi atas berjalannya program pengelolaan

²⁶ Setyo Raharjo, *Wawancara*, 19 Oktober 2018.

sampah.

Dasar ini dijadikan apatur desa untuk lebih giat mensosialisasikan program Kupas hingga masyarakat tergerak untuk menyukseskan program pengelolaan sampah. Hal yang paling prestisius dari pengelolaan sampah ini adalah mendirikan BUMDesa. Pengelolaan sampah menjadi BUMDesa sehingga mampu memanfaatkan potensi lokal Desa Panggungharjo. Di akhir tahun 2013, Kupas telah melayani 1.090 titik penjemputan. Kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp 344.363.500,- atau meningkat lebih dari 9x dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp 37.000.000.²⁷

Dengan peningkatan nilai usaha tersebut, faktanya mampu membuka lapangan kerja baru paling tidak bagi 20 orang. Kehadiran Unit Kupas juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan lain yang bernilai ekonomis maupun sosial berbasis lingkungan. Lembaga ini terebntuk di tingkat RT maupun pedukuhan, seperti Bank Sampah di Pedukuhan Glugo dan Bank Tigor (Tilasan Gorengan) di Pedukuhan Dongkelan. Keberhasilan mengelola sampah mampu menciptakan program lain, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Operasionalisasi PAUD dianggarkan dari program Kupas. Selain itu, program inovasi lain mampu menciptakan bahan kerajinan (daur ulang) dari sampah plastik. Program lain dari sistem kapitalisasi BUMDesa berbasis sampah ini telah mampu menciptakan program pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Program sosial desa ini berupa kesehatan gratis untuk para manula, kesehatan ibu dan anak-anak, serta bantuan pendidikan yang dinaungi dalam program layanan JPS.

Secara substansi, keberhasilan program Kupas juga ditentukan oleh mekanisme sosialisasi kepada warga. Pendekatan komunikasi adalah awal mula program yang berjalan dapat dikatakan berhasil. Mekanisme komunikasi yang dibangun adalah pendekatan persuasif secara personal. Pada awal pelaksanaan program, Kepala Desa Panggungharjo selalu melakukan pendekatan personal kepada warga. Tentu mekanisme ketauladanan adalah

²⁷ Hosni Bimo Wicaksono, *Wawancara*, 19 Oktober 2018.

awal dari kepercayaan masyarakat untuk menjalankan program. Selain itu, pendekatan personal lain juga dilakukan melalui komunikasi dalam bentuk formal. Hal ini berjalan melalui rapat pertemuan dengan warga, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Ibu-Ibu Program Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan warga dalam mengelola sampah, pemerintah desa melaksanakan seminar dan pelatihan. Hal yang paling esensial lainnya, untuk mendukung kesuksesan program Kupas adalah pemanfaatan media sosial online. Media ini tertera dalam *website* Desa Panggungharjo yang dikelola secara optimal. Pemberitaan terkait aktivitas dari implementasi program Kupas telah memberikan informasi dan motivasi terhadap kesadaran dan perilaku warga.

Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS)

Program ini sebagai wujud nyata pengembangan inovasi pembangunan berbasis potensi lokal. Tujuan dari program tersebut adalah terciptanya pelayanan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Sementara itu, program ini sudah berdiri sejak tahun 2013. Awal mula pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS) yang bertugas untuk memberikan layanan sosial kepada masyarakat—terutama bagi warga yang kurang mampu dan miskin. Landasan dibentuk Bapel JPS disesuaikan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa “pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Bapel JPS merupakan lembaga desa yang bertujuan untuk menyelenggarakan program jaring pengaman sosial. Program jaring pengaman sosial sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat Desa Panggungharjo agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Pemenuhan dasar hidup ini menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa atau masyarakat.

Adapun bentuk pelayanan JPS adalah layanan kesehatan yang meliputi layanan luar gedung, biaya konsultasi dan pemeriksaan medis, biaya tindakan medis kecil atau sederhana, biaya pembelian obat sesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau obat yang tersedia di PP-JPS kesehatan sesuai indikasi medis, biaya pelayanan kegawat-daruratan, *homecare* oleh Perawat Desa, pemeriksaan kehamilan selama 7 kali, Persalinan normal, pemeriksaan nifas selama 2 kali, dan 5 imunisasi lengkap untuk bayi. Sedangkan Layanan untuk JPS Pendidikan meliputi layanan asuransi pendidikan dengan *premi* dibayar oleh Bapel JPS, layanan beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai, dan beasiswa kuliah gratis.²⁸

Pendirian Bapel JPS diinisiasi langsung oleh Kepala Desa Panggungharjo. Ide awal berdirinya program tersebut sebagai respon atas realitas yang ada. Kegundahan kepala desa juga dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan atas kehadiran pemerintah desa yang dipahami hanya berkuat pada pelayanan administrasi. Keadaan ini direspon baik dan sudah masuk dalam visi kepemimpinan Wahyudi. Termaktub dalam visi “Membangun kepercayaan warga demi membangun kapasitas sosial yang kondusif”, Bapel JPS dibentuk demi membangun pemahaman bahwa selain sebagai pelayan administrasi, pemerintah desa juga hadir memberikan solusi atas permasalahan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ide tersebut ditawarkan dalam diskusi pada rapat Desa. Perdebatan muncul namun berujung pada apresiasi masyarakat desa untuk segera membuat perencanaan pendirian Bapel JPS.

Perkembangan pelaksanaan program pelayanan sosial telah menuai hambatan. Hambatan tersebut disinyalir karena putus komunikasi. Instrumen struktural melalui aparatur desa yang diharapkan mampu menyukseskan program namun kurang efektif. Analisa peneliti sebagai masalah kurang efektif komunikasi didasari oleh pemahaman aparatur desa masih menganggap pelayanan sosial bersifat administratif. Konstruksi pemikiran ini menyebabkan aparatur desa tidak menganggap program pelayanan jasa dan sosial menjadi tugas mereka. Pemikiran ini menjadikan program JPS

²⁸ Lihat dalam <https://www.panggungharjo.desa.id/bapel-jps/>

hanya ditentukan oleh komitmen dan konsistensi pengurus dan tim untuk mensosialisasikan kepada warga.²⁹

Dalam upaya menyukseskan program Bapel JPS, kecenderungan pendekatan komunikasi yang dipakai menggunakan komunikasi dua arah yang bersifat antar personal. Hal ini dilakukan oleh pengurus atau tim Bapel JPS dengan warga. Selain satu arah, pendekatan dua arah juga menjadi konsentrasi dalam sosialisasi program ini. Adapun bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan adalah dengan membuka rubrik pelayanan sosial di *website* Desa Pangungharo dan *media center* melalui *social media* maupun konvensional.

BUMDesa Panggung Lestari

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian. Lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan melihat potensi lokal. Pedoman utama pendirian lembaga mengacu kepada regulasi Permendesa no. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan tersebut telah memberikan angin segar bagi pemerintah Desa Panggungharjo. Pada bulan Maret 2013, Pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan BUMDesa yang diberi nama BUMDes Panggung Lestari. BUMDesa ini sebagai upaya pendayagunaan potensi lokal yang diharapkan menjadi entitas baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDesa Panggung lestari merupakan bagian dari langkah Kepala Desa untuk mewujudkan tujuan awal untuk kemandirian desa. Dengan desa mandiri secara nyata dapat kepercayaan warga terhadap birokrasi yang berorientasi kepada kapabilitas sosial, ekonomi, dan politik.

BUMDesa sendiri didirikan dari hasil musyawarah dengan lembaga desa, perangkat desa, dan perwakilan warga. Ide awal pendirian lembaga

²⁹ Wahyudi Anggoro, *Wawancara*, 17 Oktober 2018.

usaha ini dengan mengakuisisi program Kupas sebagai unit usaha pertama yang dijalankan oleh BUMDesa. Setelah itu, dibentuk tim yang terdiri dari perwakilan warga untuk bertanggungjawab menjalankan BUMDesa. Tujuan awal yang hendak dicapai adalah membantu pemerintahan Desa dalam usaha mewujudkan kemandirian ekonomi. Harapan dari pendirian badan usaha ini secara langsung dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut harus berimplikasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat. Selain itu, program tersebut juga diharapkan memberikan dampak bagi pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Desa Panggungharjo.

Pasca berdiri, perkembangan BUMDesa bisa dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dengan beberapa unit usaha semakin produktif dengan memasukan secara ekonomis meningkat signifikan. Keberhasilan ini dicapai berdasarkan dua faktor, antara lain *pertama*, kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan jaringan, kedua kemampuan komunikasi dalam menumbuhkan partisipasi warga. Kemampuan memanfaatkan peluang dan jaringan didominasi oleh inisiator program dan lembaga. Dalam konteks ini peranan kepala desa sungguh besar. Hampir semua program-program yang dibuat oleh setiap unit usaha BUMDesa berasal dari ide Kepala Desa yang kemudian difahamkan kepada pengurus lembaga dan semua *stakeholder* Desa Panggungharjo. Dari beberapa ide yang sudah menjadi program kebanyakan didasarkan pada pengembangan potensi desa yang dikembangkan melalui kerjasama dengan instansi lain dari swasta maupun pemerintahan pusat dan daerah.

Faktor terpenting lain yang menunjang keberhasilan lembaga BUMDesa adalah partisipasi warga dalam pelaksanaan program-program partisipasi yang ada, tidaklah hadir begitu saja namun dibutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif. Dalam pelaksanaan setiap program BUMDesa terkadang proses komunikasi tidak sama. Hal ini disebabkan karena target atau sasaran khalayak yang berbeda dari masing-masing program. Akan tetapi secara garis besar, komunikasi yang dilakukan secara langsung baik formal maupun non formal. Pada awal pelaksanaan program, Tim BUMDesa akan melakukan rapat

internal yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Setelah itu berlanjut dengan rapat besar yang melibatkan aparatur desa lain. Pelaksanaan program di lapangan yang menjadi penentu dan ujung tombak atas keberhasilan persuasif adalah peran dari TIM penggerak desa. Hampir setiap bulan, tim mengadakan rapat kecil dan komunikasi personal dengan warga yang difasilitasi langsung oleh perangkat desa (RT, RW, dan DUKUH).

Keberhasilan lain adalah penegasan yang bersifat informatif, edukatif dengan membuat berita-berita yang disebarakan melalui majalah desa dan media online tentang keberhasilan program yang dilaksanakan. Kegiatan ini dapat dirasakan secara langsung oleh warga Desa Panggungharjo. Namun media yang dijalankan sebagai sarana komunikasi tidak berjalan efektif. Hal ini dipengaruhi langsung oleh masyarakat kalangan tua yang gagap teknologi. Menanggapi kondisi ini langkah afitmatif yang dilakukan adalah turun secara langsung bertatap muka dengan warga. Komunikasi model ini telah menciptakan ruang sosial baru sehingga dapat memaksimalkan potensi atas kebutuhan masyarakat.

Secara historis, BUMDesa Panggungharjo merupakan kelanjutan dari program Kupas yang memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Selain itu, program ini menjadi salah satu sumber pembiayaan program Bapel JPS. Kontribusi lain yang dihasilkan dari program Kupas mampu menghadirkan penghasilan yang bisa membantu meningkatkan pendapatan warga dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga Panggungharjo.

Usaha lain dari pengembangan Kupas adalah usaha Kampung Mataraman. Jenis usaha ini menjadi terobosan baru yang menyediakan kebutuhan kuliner warga dan penyediaan jasa berupa peminjaman fasilitas pertemuan. Sementara itu, terobosan baru tersebut dengan menghadirkan sumber ekonomi baru berupa usaha penyewaan fasilitas event berupa fasilitas pertemuan. Dari semua program yang sudah berjalan disinyalir memberikan nilai positif dengan penghasilan yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp. 8 Miliar.

Produk usaha di Kampung Mataraman adalah hasil dari produk lokal warga berupa makanan kuliner khas Panggungharjo, buah tangan, dan kerajinan lain seperti tas, asesoris rumah tangga dan lainnya. Produk-produk tersebut merupakan hasil dari program pemberdayaan ketrampilan yang dilakukan oleh Desa Panggungharjo terhadap warga. Unit usaha lain yang bersifat swadesa adalah usaha layanan jasa berupa penyediaan gerai khusus untuk memasarkan produk lokal dari warga desa berupa Lurik, Batik, Jumputan, Makanan maupun Minuman olahan tradisional, kerajinan dan manisan tradisional anak-anak.

Usaha lain dari BUMNDesa adalah UCO. Unit usaha ini merupakan pengolahan minyak goreng bekas menjadi bahan bakar pengganti solar. Usaha ini menurut Wahyudi, solar sudah berjalan sejak tahun 2016 yang bekerjasama dengan PT. Investama Klaten. Sedangkan usaha kedua berupa PT. Sinergi Panggung Lestari, yaitu pengolahan minyak tamanu yang merupakan satu komoditas internasional dan secara luas digunakan sebagai bahan baku kosmetik.³⁰

PT. Sinergi Panggung Lestari merupakan satu-satunya produsen minyak tamanu yang ada di Indonesia. Minyak tamanu dikirimkan ke pasar internasional melalui mitra kerja yang ada di Jawa Tengah. Rata-rata PT. Sinergi Panggung Lestari menghasilkan minyak tamanu sekitar 400-600 liter per bulan. Dua unit usaha yang tergabung dalam PT. Sinergi Panggung Lestari tersebut dikerjasamakan dengan perusahaan inkubator yang ada di Singapura untuk ikut menciptakan ekosistem tepat dalam rangka pengembangan BUMDesa. Selain perusahaan inkubator, PT. Sinergi Panggung Lestari juga merupakan hasil kerjasama dengan Koperasi Wanita “Dewi Kunthi” Desa Panggungharjo.

³⁰ Disampaikan oleh Wahyudi Anggoro H. dalam sambutan pada kegiatan “penandatanganan pakta integritas serta perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh Kemendes PDTT” tanggal 12 September 2018 di Kampong Mataram Panggungharjo.

Penutup

Desa Panggungharjo secara umum menjadi desa mandiri. Hal ini terlihat dengan banyak unit usaha produktif yang mampu dikembangkan oleh Desa Panggungharjo. Namun awal mula program yang terlaksana tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Ada banyak rintangan yang menghambat proses pembangunan desa mandiri. Salah satu yang muncul dari awal pendirian desa mandiri adalah masih menemukan warga yang pesimis. Tidak yakin dengan potensi desa yang mereka miliki. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi aparat Desa Panggungharjo.

Bermula sejak Wahyudi dilantik sebagai Kepala Desa Panggungharjo. Menepis skeptis masyarakat yang pesimis bermula dengan pendekatan personal. Pendekatan ini cukup efektif dengan pola komunikasi pembangunan secara simultan. Secara turun langsung ke masyarakat untuk memetakan potensi lokal sehingga Kepala Desa Panggungharjo mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa berubah. Pada tahap ini muncul tingkat partisipasi masyarakat yang semakin percaya. Kepercayaan dibangun di atas kejujuran dan kekuatan kepemimpinan lokal yang dilakukan oleh Wahyudi.

Dengan begitu, semua program yang berjalan mampu membalikan keadaan Desa Panggungharjo menjadi desa mandiri. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan memperoleh penghargaan tingkat nasional sebagai desa mandiri dan lestari. Implikasi dari pengalaman Desa Panggungharjo ini dapat mengambil hikmah positifnya. Harapan peneliti mampu diterapkan oleh desa lain. Pembangunan dapat berjalan efektif jika komunikasi personal dapat dijalankan dengan baik oleh pemimpin atau kepala desa. Tanpa ada komunikasi yang baik tidak mungkin program pemberdayaan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Daftar Pustaka

Al-Kautsari, Mirza Maulana. "Model Transisi Peningkatan Partisipasi

- Masyarakat Desa: Strategi Pengembangan Usaha Industri Kreatif Kerajinan Batik di Desa Kreet, Kabupaten Bantul.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 1 (2017): 23. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-02>.
- Anas, Muhammad, Wahyu Widodo, and FX Sugiyanto. “Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Economics Development Analysis Journal* 5, no. 4 (2016): 426–43.
- Anyaegbunam, Chike, Paolo Mefalopulos, and Moetsabi Titus. *Participatory Rural Communication Appraisal Starting with The People*. Zimbabwe: SADC Centre of Communication for Development, 2004.
- Blickem, Christian, Shoba Dawson, Susan Kirk, Ivaylo Vassilev, Amy Mathieson, Rebecca Harrison, Peter Bower, and Jonathan Lamb. “What Is Asset-Based Community Development and How Might It Improve the Health of People With Long-Term Conditions? A Realist Synthesis.” *SAGE Open* 8, no. 3 (2018): 1–13. <https://doi.org/10.1177/2158244018787223>.
- Chambers, R., and R. Conway. “Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century.” *IDS Discussion Paper*. Vol. 296, 1992.
- Eko, Sutoro, Krisdyatmiko, and Abdur Rozaki. *Kaya Proyek, Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. Yogyakarta: IRE & Yayasan Tifa, 2006.
- Ermaya, Berna Sudjana. “Kemandirian Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan.” *Litigasi* 16, no. 2 (January 7, 2016). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36>.
- Gayatri, Made Yeni Latrini, and Ni Luh Sari Widhiyani. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan.” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10, no. 2 (2017): 175–82. <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p07>.
- Habibi, Fikri. *Pasang Surut Otonomi Desa*. Serang: Universitas Serang Raya, 2017.
- Indirasari, Diah. “Kemandirian Desa di Era Otonomi Daerah, Studi Kasus di Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala.” Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Israr, Muhammad, Khan Humayun, Jan Dawood, and Ahmad Nafees. “Livelihood Diversification: A Streatagy for Rural Income Enhancement.” *Journal of Finance and Economics* 2, no. 5 (2014): 194–98. <https://doi.org/10.12691/jfe-2-5-10>.
- Kurniawan, Borni., and M. Zainal. Anwar. *Menjembatani Rakyat dan Negara: Pengalaman Advokasi IRE Yogyakarta*. Yogyakarta: IRE & Asia Foundation,

2011.

- Kurniawan, Borni, Titi Kusriani, and Arief Kurniawan. *Rural Economics*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017.
- Pranoto, Asa Ria, and Dede Yusuf. "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarij Aya." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22146/jsp.13094>.
- "Profil dan Program Kerja Desa Panggungharjo." Pemerintah Desa Panggungharjo, 2013. <http://panggungharjo-bantul.desa.id>.
- Sidik, Fajar. "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19, no. 2 (2015): 115–31. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>.
- Simatupang, Erwinton, and Vandy Yoga Swara. "Creating Shared Value di Industri Migas Pelajaran Dari Balongan dalam Meminimalisir Pengangguran dan Menekan Potensi Kecelakaan Kerja" 2, no. 1 (2018): 63–86. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-04>.
- Sutedja, Lene Topp, and Cristina Eghenter. *Kayan Mentarang National Park in the Heart of Borneo*. Copenhagen: WWF Denmark in collaboration with WWF Indonesia, 2005.
- Suyatno, Hempri, and Suparjan. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Widuri, Diah, and Saubaki Patje. *Partisipasi Warga dalam Penanggulangan Kemiskinan: Pelajaran Berharga Dari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Stock Take: Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Yogyakarta: IRE, 2012.
- Zakaria, Wan Abbas. *Membangun Kemandirian Desa*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.